

Determinants of Internal Control Systems on the Financial Performance of Billboard Tax (Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi)

Zahra Rasyanda Febro^{1*}, Iskandar Sam², Wiwik Tiswiyanti³
Jambi University

Corresponding Author: Zahra Rasyanda Febro zahararasyandafebro4@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords: Control Environment, Risk Assessment, Control Activities, Monitoring, Financial Performance

Received : 18, August

Revised : 21, September

Accepted: 29, October

©2024 Febro, Sam, Tiswiyanti: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRACT

This study aims to identify the extent of the impact of control environment, risk assessment, control activities, information and communication, and monitoring processes on financial performance. A descriptive quantitative approach is applied in this research. The sample is purposively selected based on specific criteria, with primary data collected through distributed questionnaires. For data analysis, the study utilizes descriptive statistics and multiple linear regression with SPSS 29 software. The findings reveal that, partially, the control environment has a positive and significant effect on financial performance, while risk assessment shows no significant impact on financial performance. Additionally, control activities have a positive and significant effect on financial performance, whereas information and communication, as well as monitoring, do not show a significant impact on financial performance.

Determinan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Keuangan Pajak Reklame (Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi)

Zahra Rasyanda Febro^{1*}, Iskandar Sam², Wiwik Tiswiyanti³

Jambi University

Corresponding Author: Zahra Rasyanda Febro zahararasyandafebro4@gmail.com

ARTICLE INFO

Kata Kunci: Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, Kegiatan Pengendalian, Pemantauan, Kinerja Keuangan

Received : 18, August

Revised : 21, September

Accepted: 29, October

©2024 Febro, Sam, Tiswiyanti: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRAK

Penelitian ini bermaksud guna mengidentifikasi seberapa besar dampak dari lingkungan pengendalian, evaluasi risiko, aktivitas pengendalian, penyampaian informasi dan komunikasi, serta proses pemantauan pada kinerja keuangan. Penelitian ini menerapkan pendekatan kuantitatif deskriptif. Sampel penelitian diambil secara purposif berdasarkan kriteria tertentu. Data utama yang dipergunakan berasal dari kuesioner yang disebar. Untuk analisis data, penelitian ini memanfaatkan statistik deskriptif serta regresi linier berganda melalui bantuan aplikasi SPSS 29. Menurut hasil penelitian, secara parsial ditemukan bahwasanya lingkungan pengendalian memiliki pengaruh positif dan signifikan pada kinerja keuangan, sedangkan evaluasi risiko tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Selanjutnya, aktivitas pengendalian membawa pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan, namun informasi dan komunikasi, serta pemantauan, tidak menunjukkan pengaruh signifikan pada kinerja keuangan.

PENDAHULUAN

Operasional pemerintahan daerah dalam menjalankan desentralisasi dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan di seluruh wilayah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, pendapatan daerah bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan, dan sumber pendapatan lainnya. PAD sendiri meliputi pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan aset daerah tertentu, serta pemasukan dari sumber daya lainnya. Inti dari PAD adalah menyediakan pembiayaan untuk pelaksanaan otonomi daerah yang disesuaikan dengan potensi lokal masing-masing daerah.

Salah satu jenis pajak daerah yang penting yakni pajak reklame, yang berpotensi meningkat seiring dengan pesatnya perkembangan media promosi di Kota Jambi. Pajak ini memiliki peluang besar untuk meningkatkan penerimaan daerah. Namun, dalam lima tahun terakhir, realisasi penerimaan pajak reklame di Kota Jambi menunjukkan penurunan signifikan dibandingkan target yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Sejak tahun 2019, terdapat penurunan yang cukup tajam dalam realisasi penerimaan pajak reklame di Kota Jambi, meskipun jumlah wajib pajak terus bertambah. Pada tahun 2023, realisasi penerimaan pajak reklame hanya mencapai 27,46% dari target yang diinginkan. Pajak reklame, sebagai salah satu sumber penerimaan penting selain pajak restoran dan pajak hotel, dipengaruhi oleh terbatasnya lokasi untuk reklame serta ketidakpatuhan wajib pajak dalam pendaftaran dan pembayaran pajak secara tepat waktu.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang ditekankan pada Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 bertujuan untuk menghasilkan laporan keuangan yang akurat, efisien, dan dapat diandalkan, serta untuk melindungi aset dan menjamin kepatuhan pada peraturan. Penerapan sistem pengendalian internal yang baik harapannya mampu meminimalisir risiko kesalahan dan kecurangan dalam pengelolaan pajak reklame, yang pada gilirannya berdampak positif pada peningkatan PAD.

Efektivitas pengendalian internal dapat diukur dari kemampuan entitas dalam mengenali komponen-komponen pengendalian internal dengan tepat. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008, SPIP tersusun atas lima elemen kunci, yakni lingkungan pengendalian, analisis risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Agency

Teori keagenan menjelaskan adanya hubungan kontrak antara pemilik (prinsipal) dan pengelola (agen). Permasalahan utama yang diangkat dalam teori ini adalah konflik kepentingan antara kedua belah pihak. Prinsipal merujuk pada pemilik usaha, sedangkan agen bertindak sebagai pengelola. Keduanya memiliki tujuan yang berbeda dalam pengelolaan bisnis, termasuk cara optimalisasi keuntungan dan kepuasan dari kegiatan usaha yang dijalankan (Purba, 2023).

Kinerja Keuangan

Keuangan memiliki definisi yang sangat luas. Berdasarkan Ikatan Akuntan Indonesia, kinerja keuangan menggambarkan sejauh mana perusahaan mampu mengoptimalkan sumber daya yang dimilikinya. Jumingan (2014) mengemukakan bahwa kinerja keuangan merupakan ilustrasi kondisi keuangan perusahaan dalam periode tertentu, yang meliputi aspek penghimpunan serta pemanfaatan dana, dengan penilaian yang didasarkan pada indikator seperti kecukupan modal dan tingkat likuiditas. Pemeriksaan terhadap teks asli memastikan perubahan dilakukan tanpa mengurangi esensinya.

Panduan kinerja keuangan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 Tahun 2020 memberikan acuan kepada pemerintah daerah dalam mengelola keuangan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas sesuai tata kelola yang baik.

Sistem Pengendalian Internal

Sistem pengendalian internal ialah serangkaian proses dan tindakan oleh manajemen serta staf yang bertujuan untuk memastikan bahwa tujuan organisasi tercapai dengan efektif dan efisien, laporan keuangan andal, aset terlindungi, serta kepatuhan terhadap hukum sesuai Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008. Sistem ini diterapkan di tingkat pemerintahan pusat dan daerah secara menyeluruh. Unsur-unsur utama dari sistem ini mencakup aktivitas pengendalian, penilaian risiko, lingkungan pengendalian, komunikasi dan informasi, serta pemantauan.

H1: Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, Aktivitas Pengendalian, Informasi dan Komunikasi, serta Pemantauan berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan

Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian menurut Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 memberikan landasan bagi penerapan pengendalian internal yang efektif, yang mendukung kedisiplinan dan keteraturan dalam organisasi. Manajer di instansi pemerintah harus menciptakan suasana kerja yang mendorong perilaku positif dan penerapan sistem pengendalian internal. Lingkungan ini dapat dibentuk melalui: (a) komitmen pada kompetensi, (b) struktur organisasi yang tepat, (c) pemberian wewenang dan tanggung jawab, (d) penerapan kebijakan, (e) pembentukan organisasi, serta (f) kerja sama yang efektif. Penelitian Damanik (2019) menunjukkan lingkungan pengendalian membawa dampak signifikan pada kinerja keuangan karena adanya penerapan langkah pengendalian lingkungan berdampak pada hasil keuangan.

H2: Lingkungan Pengendalian berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan

Penilaian Risiko

Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 menyebutkan penilaian risiko dilakukan guna mengevaluasi kemungkinan kejadian yang menghambat pencapaian tujuan lembaga pemerintah. Penilaian ini dimulai dengan menetapkan tujuan dan sasaran yang selaras untuk instansi, baik pada tingkat lembaga maupun kegiatan. Instansi juga perlu mengidentifikasi risiko yang bisa menghalangi pencapaian tujuan secara efisien dan efektif dari sumber internal maupun eksternal. Risiko yang telah diidentifikasi selanjutnya dianalisis guna menilai dampaknya pada tujuan. Pimpinan lembaga membuat

strategi pengelolaan dan pengendalian risiko untuk meminimalkan potensi risiko. Penelitian Damanik (2019) menunjukkan bahwasanya penilaian risiko berpengaruh signifikan pada kinerja keuangan karena proses identifikasi dan analisis risiko membantu mengurangi kesalahan.

H3: Penilaian Risiko berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Kegiatan Pengendalian

Menurut PP No. 60 Tahun 2008, kegiatan pengendalian yakni aturan yang memandu pimpinan lembaga dalam mengurangi risiko yang telah diidentifikasi. Kegiatan ini melibatkan peninjauan operasi lembaga, pengembangan SDM, pemantauan sistem informasi, pengendalian fisik aset, evaluasi kinerja, pemisahan fungsi, otorisasi transaksi, serta pencatatan yang akurat dan tepat waktu, pembatasan akses ke sumber daya dan data, serta dokumentasi transaksi yang terkait dengan kontrol internal. Evaluasi Damanik (2019) menyimpulkan bahwa kegiatan pengendalian membawa dampak signifikan pada kinerja keuangan karena langkah-langkah pengendalian tersebut telah diterapkan secara efektif.

H3: Kegiatan Pengendalian berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Informasi dan Komunikasi

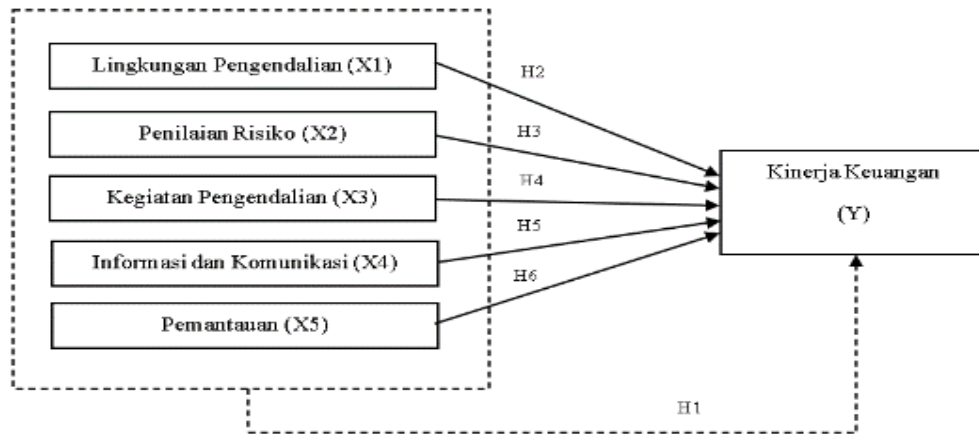
Menurut PP 60 Tahun 2008, informasi dan komunikasi adalah mekanisme dalam penyediaan serta penyampaian informasi keuangan. Instansi pemerintah perlu memiliki informasi yang valid dan terpercaya, baik keuangan maupun non-keuangan, terkait kondisi internal dan eksternal organisasi. Informasi ini perlu disampaikan kepada pimpinan serta pihak yang membutuhkannya untuk menunjang pengendalian internal dan tanggung jawab operasional. Damanik (2019) dalam penelitiannya menemukan bahwa informasi dan komunikasi berdampak signifikan terhadap kinerja keuangan karena peran komunikasi dalam lingkungan kerja.

H4: Informasi dan Komunikasi berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemantauan

Pemantauan sesuai Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 merupakan evaluasi kualitas implementasi sistem pengendalian internal dan proses yang memastikan hasil audit ditindaklanjuti segera. Pengawasan sistem pengendalian dilakukan melalui kegiatan rutin, pemantauan, perbandingan, rekonsiliasi, dan tindakan lainnya. Penilaian khusus digunakan untuk mengevaluasi efektivitas sistem melalui self-assessment, peninjauan, dan uji coba efektivitas. Evaluasi ini bisa dilakukan oleh aparat internal atau eksternal pemerintah dengan checklist khusus. Hasil penelitian Damanik (2019) menunjukkan pemantauan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan, karena peran pengawasan memberikan efek positif pada pencapaian kinerja keuangan.

H5: Pemantauan berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan

Berdasarkan pemikiran yang telah diuraikan, terlihat adanya hubungan antara Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi, serta Pemantauan dalam peningkatan Kinerja Keuangan.



Gambar 1. Kerangka Konseptual

METODOLOGI

Penelitian ini adalah jenis studi kuantitatif yang dilaksanakan di kantor Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Jambi, menggunakan data primer sebagai sumber informasi utama. Pemilihan sampel dilakukan secara sengaja, menyesuaikan dengan kriteria tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya. Data dikumpulkan melalui kuesioner yang berisi pernyataan-pernyataan tentang variabel independen, yakni lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan, dan variabel dependen berupa kinerja keuangan. Setiap pernyataan diukur melalui skala Likert dari 1 sampai 5. Untuk memastikan analisis data yang efisien dan akurat, pengolahan data statistik dilakukan menggunakan aplikasi SPSS.

HASIL PENELITIAN

Penelitian ini mempergunakan analisis deskriptif juga dilakukan untuk melihat gambaran Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi, Pemantuan, dan Kinerja Keuangan.

1. Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

Uji validitas bertujuan guna memastikan bahwa instrumen penelitian dapat mengukur variabel sesuai dengan yang diharapkan. Suatu item pertanyaan dinilai valid bilamana nilai R-hitung lebih besar dari R-tabel. Pada penelitian ini, dengan sampel sebanyak 19 responden, diperoleh derajat kebebasan (df) sebesar $19-2 = 17$, sehingga R-tabel adalah 0,4555. Hasil uji validitas untuk variabel seperti lingkungan pengendalian (X1), penilaian risiko (X2), aktivitas pengendalian (X3), informasi dan komunikasi (X4), pemantauan (X5), serta kinerja keuangan (Y) menunjukkan bahwa nilai R-hitung yang dihasilkan melalui SPSS 29.0 lebih besar daripada R-tabel untuk semua pernyataan pada setiap variabel. Hal ini menandakan bahwa semua indikator adalah valid dan siap untuk digunakan dalam analisis selanjutnya.

Setelah semua item pertanyaan dinyatakan valid, langkah selanjutnya yakni menjalankan uji reliabilitas. Keputusan mengenai reliabilitas diambil berdasarkan nilai Cronbach Alpha, di mana item dikategorikan

sebagai reliabel bilamana Cronbach Alpha > 0,60, sementara itu bilamana nilainya < 0,60, maka dianggap tidak reliabel. Hasil uji reliabilitas pada masing-masing variabel penelitian menunjukkan tingkat reliabilitas yang baik, dengan nilai Cronbach Alpha melebihi 0,60.

2. Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda diterapkan guna mengevaluasi seberapa besar dampak dari variabel Lingkungan Pengendalian (X1), Penilaian Risiko (X2), Aktivitas Pengendalian (X3), Informasi dan Komunikasi (X4), serta Pemantauan (X5) terhadap variabel Kinerja Keuangan (Y). Hasil analisis tersebut disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 1. Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error				Tolerance	VIF
1	(Constant)	-5.952	6.472		-.920	.374		
	Lingkungan Pengendalian	.651	.287	.487	2.269	.041	.461	2.170
	Penilaian Risiko	.410	.267	.239	1.537	.148	.877	1.140
	Kegiatan Pengendalian	.698	.302	.497	2.311	.038	.459	2.179
	Informasi dan Komunikasi	-.359	.381	-.232	-.942	.363	.351	2.851
	Pemantauan	.196	.314	.134	.623	.544	.459	2.179

a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan

Berdasarkan hasil tabel 1, maka dapat dihasilkan persamaan regresi linear berganda sebagai hasil berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + \beta_4X_4 + \beta_5X_5 + \epsilon$$

$$Y = -5.952 + 0,651X_1 + 0,410X_2 + 0,698X_3 - 0,359X_4 + 0,196X_5 + \epsilon$$

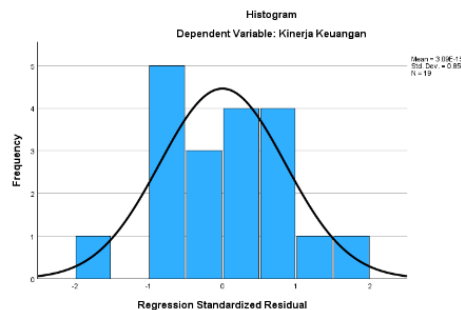
Persamaan regresi linear berganda mampu dijabarkan seperti berikut:

- a. Nilai konstanta yang bernilai negatif sebesar -5,952 memperlihatkan bahwasanya tanpa adanya pengaruh dari variabel independen—termasuk lingkungan pengendalian (X₁), penilaian risiko (X₂), kegiatan pengendalian (X₃), informasi dan komunikasi (X₄), serta pemantauan (X₅)—kinerja keuangan diproyeksikan pada posisi -5,952. Dengan kata lain, bilamana setiap variabel independen bernilai 0 atau tidak mengalami perubahan, alhasil kinerja keuangan diprediksi akan berada di angka negatif tersebut.
- b. Variabel lingkungan pengendalian (X₁) mempunyai koefisien positif sebesar 0,651, yang menandakan bahwa peningkatan variabel ini sebesar satu unit akan mendorong kinerja keuangan meningkat sebesar 0,651. Pengaruh ini secara statistik signifikan (sig = 0,041 < 0,05), mengindikasikan bahwa lingkungan pengendalian memiliki dampak positif terhadap kinerja keuangan.
- c. Untuk variabel penilaian risiko (X₂), koefisien positif sebesar 0,410 memperlihatkan bahwasanya setiap kenaikan satu unit dalam variabel ini diperkirakan akan meningkatkan kinerja keuangan sebesar 0,410. Namun, dampak ini tidak signifikan secara statistik (sig = 0,148 > 0,05), sehingga penilaian risiko tidak memiliki pengaruh signifikan pada kinerja keuangan.

- d. Variabel kegiatan pengendalian (X3) menunjukkan koefisien positif sebesar 0,698, yang berarti bahwa peningkatan satu unit pada variabel ini akan mengangkat kinerja keuangan sebesar 0,698. Pengaruh ini signifikan secara statistik ($\text{sig} = 0,038 < 0,05$), menandakan bahwasanya aktivitas pengendalian berpengaruh signifikan pada kinerja keuangan.
- e. Nilai koefisien variabel informasi dan komunikasi (X4) yang bernilai negatif sebesar -0,359 mengindikasikan bahwa peningkatan satu unit dalam variabel ini cenderung menurunkan kinerja keuangan sebesar 0,359. Namun, secara statistik, pengaruh ini tidak signifikan ($\text{sig} = 0,363 > 0,05$), sehingga informasi dan komunikasi tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan.
- f. Variabel pemantauan (X5) memiliki koefisien positif sebesar 0,196, menunjukkan bahwa peningkatan satu unit pada variabel ini diperkirakan akan menaikkan kinerja keuangan sebesar 0,196. Namun, dampaknya tidak signifikan secara statistik ($\text{sig} = 0,544 > 0,05$), memperlihatkan bahwasanya pemantauan tidak memberikan pengaruh signifikan pada kinerja keuangan.

3. Uji Normalitas

Uji normalitas dijalankan guna mengidentifikasi apakah variabel pengganggu atau residual pada model regresi mengikuti distribusi normal. Adapun dua metode untuk mendeteksi apakah residual mempunyai distribusi normal atau tidak.



Gambar 2. Grafik Histogram

Berdasarkan pengamatan pada Gambar 2, terlihat bahwa nilai residual dari data observasi menunjukkan distribusi normal, karena grafik cenderung membentuk pola kurva yang menyerupai lonceng, sesuai dengan karakteristik distribusi normal.

4. Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas dijalankan guna mendeteksi adanya hubungan antar variabel independen pada penelitian. Pengujian ini dilaksanakan dengan memeriksa nilai VIF (Variance Inflation Factor), di mana indikasi multikolinearitas muncul jika $\text{VIF} > 10,00$ atau $\text{Tolerance} < 0,01$. Sebaliknya, jika $\text{VIF} < 10,00$ dan $\text{Tolerance} > 0,01$, maka tidak ada

multikolinearitas di antara variabel-variabel independen. Hasil Uji Multikolinearitas dapat dilihat pada tabel berikut ini:

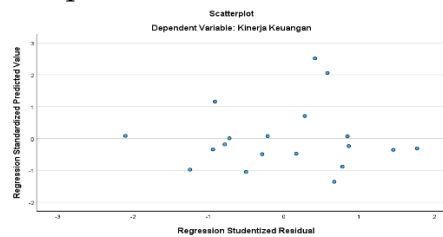
Tabel 2. Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel Bebas	Collinearity Statistic		Keterangan
	Tolerance	VIF	
Lingkungan Pengendalian	0,461	2.170	Tidak terjadi multikolinearitas
Penilaian Risiko	0,877	1.140	Tidak terjadi multikolinearitas
Kegiatan Pengendalian	0,459	2.179	Tidak terjadi multikolinearitas
Informasi dan Komunikasi	0,351	2.851	Tidak terjadi multikolinearitas
Pemantauan	0,459	2.179	Tidak terjadi multikolinearitas

Berdasarkan tabel 9, hasil uji menunjukkan bahwa Tolerance untuk masing-masing variabel bebas berada di atas 0,10, dengan VIF di bawah 10,00, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ditemukan multikolinearitas di antara variabel bebas.

5. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan guna menentukan apakah terdapat perbedaan varians residual antara satu pengamatan dengan pengamatan lainnya dalam model regresi. Model regresi yang ideal adalah model yang bersifat homoskedastis, yaitu tidak mengalami heteroskedastisitas. Deteksi keberadaan heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan mengamati grafik scatterplot berikut ini:



Gambar 3. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan scatterplot pada Gambar 3, terlihat bahwa titik-titik tersebar secara acak dan merata baik di atas maupun di bawah sumbu Y pada nilai 0. Pola ini memperlihatkan bahwa model regresi bebas dari heteroskedastisitas, atau dapat dikatakan, data bersifat homoskedastis. memiliki sifat homogen. Atas dasar tersebut, model regresi ini layak untuk digunakan.

PEMBAHASAN

1. Pengaruh Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi, serta Pemantauan Secara Simultan Terhadap Kinerja Keuangan

Uji simultan memperlihatkan bahwasanya variabel lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan bersama-sama berdampak pada kinerja keuangan. Temuan ini menunjukkan jika penerapan sistem pengendalian internal yang kokoh memiliki hubungan langsung dengan perbaikan kinerja keuangan. Semakin baik implementasi unsur-unsur pengendalian ini,

semakin optimal pula hasil kinerja keuangan; sebaliknya, kelemahan dalam sistem pengendalian internal berpotensi menurunkan kinerja keuangan.

Penelitian ini searah dengan hasil studi sebelumnya, seperti yang ditemukan oleh Anju Agustin Damanik (2019), yang menemukan bahwasanya lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan berpengaruh signifikan pada kinerja keuangan, khususnya dalam konteks penyerapan anggaran pemerintah daerah.

Menurut teori agensi, pengelolaan yang efektif antara principal dan agent sangat penting untuk mencapai kinerja keuangan yang optimal. Sistem pengendalian internal yang andal dapat mengurangi asimetri informasi dan mengatasi konflik kepentingan, serta mencegah tindakan agent yang berorientasi pada kepentingan pribadi. Dengan menerapkan lingkungan pengendalian yang baik, penilaian risiko yang menyeluruh, kegiatan pengendalian yang terarah, serta komunikasi dan pemantauan yang efektif, principal dapat memastikan agent bertindak selaras dengan tujuan organisasi. Ini pada akhirnya meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi, serta mengurangi risiko perilaku oportunistik yang merugikan kinerja keuangan.

2. Pengaruh Lingkungan Pengendalian terhadap Kinerja Keuangan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada uji parsial, variabel lingkungan pengendalian membawa dampak yang signifikan pada kinerja keuangan. Pengaruh ini menggambarkan bahwa penerapan lingkungan pengendalian yang efektif di BPPRD, yang mencakup nilai-nilai integritas dan etika, komitmen pada kompetensi, serta kepemimpinan yang mendukung, berdampak positif terhadap kinerja keuangan.

Penelitian ini konsisten dengan studi yang dijalankan oleh Anju Agustin Damanik (2019) yang menemukan bahwasanya lingkungan pengendalian berpengaruh signifikan pada kinerja keuangan pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara. Dalam penelitian tersebut, faktor-faktor seperti etika dan integritas yang kuat, kepemimpinan yang mendukung, serta komitmen terhadap kompetensi dianggap berperan besar dalam peningkatan kinerja keuangan di instansi pemerintah.

Hasil ini dijelaskan oleh teori agensi, yang menggambarkan hubungan antara principal (pemerintah) dan agent (manajemen dan pegawai). Penerapan lingkungan pengendalian yang baik di BPPRD membantu memitigasi konflik kepentingan, mengurangi asimetri informasi, dan memastikan agent bertindak sesuai kepentingan principal.

3. Pengaruh Penilaian Risiko terhadap Kinerja Keuangan

Hasil penelitian pada uji parsial, variabel penilaian risiko menunjukkan tidak pengaruh signifikan pada kinerja keuangan. Temuan ini mencerminkan bahwa proses penilaian risiko yang ada di BPPRD Kota Jambi masih belum optimal dalam mempengaruhi kinerja keuangan, ini disebabkan kurangnya implementasi dan integrasi penilaian risiko sehingga berakibatkan kurangnya efektivitas yang mempengaruhi kinerja keuangan selain itu juga kurangnya kesiapan instansi dalam menangani risiko yang terjadi. Pengelolaan risiko yang terjadi yang bisa saja berakibat dengan

adanya peningkatan biaya tak terduga, kurangnya finansial atau ketidakmampuan mencapai target anggaran.

Hasil ini bertentangan dengan penelitian Anju Agustin Damanik (2019), yang menemukan bahwa penilaian risiko berpengaruh signifikan pada kinerja keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah. Penelitian tersebut menyatakan bahwa arahan spesifik bagi pegawai diperlukan agar mereka memahami fungsi instansi dan keselarasan tujuan dalam rencana strategik. Ketidaksihesuaian hasil ini diduga disebabkan oleh perbedaan tingkat kematangan sistem pengendalian internal di masing-masing instansi.

Konteks teori agensi, ketidaksihoptimalan penilaian risiko dapat timbul akibat konflik kepentingan antara principal dan agent. Agent memiliki informasi lebih baik tentang risiko operasional, namun jika penilaian risiko tidak terintegrasi dengan baik, asimetri informasi terjadi, di mana principal kekurangan akses ke informasi penting. Agent mungkin tidak mengelola risiko dengan tepat karena kurangnya insentif atau pemahaman yang memadai. Teori agensi menekankan perlunya mekanisme kontrol yang kuat untuk memastikan agent bertindak sesuai kepentingan principal. Penilaian risiko yang efektif mengurangi asimetri informasi, memastikan manajemen risiko yang transparan dan akuntabel, serta mencegah kerugian dan inefisiensi anggaran.

4. Pengaruh Kegiatan Pengendalian terhadap Kinerja Keuangan

Hasil uji parsial memperlihatkan bahwasanya variabel kegiatan pengendalian membawa dampak yang signifikan pada kinerja keuangan. Pengaruh ini menandakan efektivitas penerapan pengendalian di BPPRD, termasuk prosedur pengawasan dan pemisahan tugas, yang berdampak positif pada peningkatan kinerja keuangan. Pengelolaan kegiatan pengendalian yang efektif membantu meminimalkan kesalahan, kecurangan, dan ketidakefisienan, sehingga mendukung pencapaian target keuangan yang lebih optimal.

Penelitian ini searah dengan studi yang dijalankan oleh Damanik (2019) yang menemukan bahwasanya penilaian risiko berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah. Dalam penelitian tersebut, terlihat bahwa pengendalian yang baik melalui reuiew kinerja instansi memungkinkan evaluasi pelaksanaan kegiatan sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga manajemen dapat lebih mudah mencapai tujuan organisasi.

Dari perspektif teori agensi, kegiatan pengendalian yang efektif berperan penting dalam mengurangi konflik kepentingan antara principal dan agent. Principal mengharapkan agent untuk mengelola sumber daya publik secara efektif dan efisien. Kegiatan pengendalian seperti pemisahan tugas, otorisasi transaksi, dan pengawasan berfungsi mengurangi risiko moral hazard dan asimetri informasi, memastikan agent bertanggung jawab atas tindakannya, serta meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan.

5. Pengaruh Informasi dan Komunikasi terhadap Kinerja Keuangan

Hasil penelitian dalam uji parsial menunjukkan bahwa variabel informasi dan komunikasi tidak berdampak signifikan pada kinerja

keuangan. Temuan ini menggambarkan bahwa proses penyampaian informasi dan komunikasi di BPPRD Kota Jambi masih belum cukup efektif untuk mempengaruhi kinerja keuangan secara maksimal. Hal ini terjadi karena distribusi informasi yang relevan dan akurat belum merata, serta komunikasi internal dan fasilitas komunikasi masih terbatas. Sistem komunikasi yang kurang efektif menghambat alur pertukaran informasi, sehingga pengambilan keputusan dan transparansi dalam pengelolaan keuangan juga turut terpengaruh. Kondisi ini menimbulkan asimetri informasi antara agent dan principal. Kurangnya koordinasi dan komunikasi yang baik dapat mengakibatkan ketidakjelasan tugas, risiko kesalahan, dan kerugian yang berdampak pada penurunan kinerja keuangan organisasi. Tanpa transparansi dan komunikasi yang memadai, agent berpotensi membuat keputusan yang kurang tepat, yang akhirnya menghambat peningkatan kinerja keuangan.

Temuan ini berbeda dengan penelitian Anju Agustin Damanik (2019) yang menunjukkan bahwa informasi dan komunikasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah. Dalam penelitian tersebut, terlihat bahwa instansi terkait telah menyediakan dan memanfaatkan segala bentuk serta sarana komunikasi pada lingkungan kerja mereka.

6. Pengaruh Pemantauan terhadap Kinerja Keuangan

Hasil penelitian pada uji parsial memperlihatkan bahwasanya variabel pemantauan tidak berpengaruh signifikan pada kinerja keuangan. Temuan ini mencerminkan bahwa proses pemantauan di BPPRD Kota Jambi masih belum optimal dalam mempengaruhi kinerja keuangan. Hal ini diakibatkan oleh kurangnya evaluasi dan tindak lanjut secara berkala terhadap proses pengelolaan keuangan serta lemahnya pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan keuangan yang dilakukan. pemantauan berfungsi sebagai instrumen penting dalam mengurangi asimetri informasi dan meminimalkan risiko moral hazard, dimana agent mungkin bertindak tidak sesuai dengan kepentingan principal jika tidak ada pengawasan yang memadai. Sistem pemantauan yang ada masih belum mampu mendeteksi dan mencegah terjadinya kesalahan atau penyimpangan dalam waktu yang tepat, yang akhirnya mempengaruhi efektivitas pengelolaan keuangan.

Temuan penelitian ini tidak searah dengan hasil studi yang dijalankan oleh Anju Agustin Damanik (2019), yang mengungkapkan bahwa pemantauan memiliki pengaruh signifikan pada kinerja keuangan di Satuan Kerja Perangkat Daerah. Pemantauan memberikan dampak positif bagi peningkatan kinerja keuangan, karena elemen-elemen dalam pemantauan merupakan faktor penunjang untuk menciptakan kinerja keuangan yang optimal.

Kurangnya evaluasi berkala dan sistem pemantauan yang tidak terintegrasi menyebabkan kelemahan dalam pengawasan dan pengambilan keputusan, yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan secara keseluruhan. BPPRD perlu memperkuat mekanisme pemantauan dengan memastikan proses diawasi secara efektif, mengevaluasi kelemahan, dan menindaklanjuti

hasil pemantauan dengan cepat. Penguatan sistem pemantauan dan peningkatan kapasitas pengawasan internal, melalui pelatihan dan teknologi, diperlukan untuk memastikan pengelolaan keuangan sesuai dengan tujuan principal dan mencegah perilaku oportunistik dari agent.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwasanya lingkungan pengendalian, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta penilaian risiko membawa pengaruh bersama pada kinerja keuangan BPPRD Kota Jambi. Lingkungan pengendalian dan kegiatan pengendalian terbukti berpengaruh signifikan pada kinerja keuangan, menunjukkan bahwa penerapan pengendalian yang efektif mampu meningkatkan kinerja keuangan. Akan tetapi, penilaian risiko, informasi dan komunikasi, serta pemantauan tidak memberikan pengaruh signifikan, mengindikasikan adanya kelemahan dalam sistem tersebut yang menghambat pengelolaan keuangan secara optimal.

Saran untuk BPPRD Kota Jambi adalah memperkuat proses penilaian risiko dengan pelatihan pegawai untuk meningkatkan kesiapan dalam menghadapi risiko. Selain itu, pengembangan sistem informasi dan komunikasi yang lebih transparan dan tepat waktu perlu diperhatikan agar mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Sistem pemantauan juga perlu diperbaiki untuk mendeteksi dan mencegah kesalahan secara efektif. Lingkungan pengendalian yang sudah efektif perlu terus dipertahankan dengan audit dan review berkala guna memastikan kinerja keuangan dapat terus meningkat.

PENELITIAN LANJUTAN

Penelitian lanjutan dari penelitian ini dapat difokuskan pada beberapa area penting. Pertama, penelitian lebih mendalam mengenai faktor-faktor spesifik yang menyebabkan penilaian risiko, informasi dan komunikasi, serta pemantauan tidak berpengaruh signifikan pada kinerja keuangan dapat dilakukan untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan yang lebih detail. Selain itu, analisis terhadap pengaruh teknologi informasi dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan juga dapat dijadikan topik penelitian lanjutan. Studi mengenai implementasi pengendalian internal di instansi lain atau pada sektor yang berbeda, seperti sektor swasta, dapat memperkaya perspektif dan memberikan perbandingan yang lebih luas mengenai efektivitas pengendalian internal dalam mempengaruhi kinerja keuangan. Penelitian selanjutnya juga bisa mempertimbangkan aspek lain seperti budaya organisasi dan gaya kepemimpinan yang berpotensi memengaruhi keberhasilan pengendalian internal.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada setiap pihak yang telah berkontribusi pada penyusunan karya ilmiah ini. Tanpa doa dan bantuan mereka, pencapaian ini tidak akan mungkin terwujud. Penulis juga berharap agar karya ilmiah ini dapat mendatangkan manfaat bagi para pembaca yang memerlukannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, S. (2017). *Auditing* (Edisi 5). Salemba Empat.
- Batubara, L. H. (2020). *Analisis Sistem Pengendalian Internal dalam Pencapaian Target Penerimaan Pajak Air Bawah Tanah di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan*.
- Damanik, A. A. (2019). *Analisis Peran Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Keuangan Daerah Pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara*. 1-19.
- Djajanegara, A. R. (2020). Teknik Analisis Data (Analisis Kualitatif Pada Hasil Kuesioner) Oleh : Asep R. Djajanegara. *Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Dakwah*, 1-11.
- Ferdinand, A. (2016). *Metode Penelitian Manajemen: Pedoman Penelitian untuk Skripsi, Tesis, dan Disertasi Ilmu Manajemen*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2017). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Jumingan. (2014). *Analisis Laporan Keuangan*. Bumi Aksara.
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan* (Edisi Revi). Penerbit Andi.
- Nurnaluri, S., Hasbuddin, & Ratu, W. O. M. (2019). *Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemungutan Pajak Daerah pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Kendari*. 4.
- Nuzwan Sudariana, & Yoedani. (2022). Analisis Statistik Regresi Linier Berganda. *Seniman Transaction*, 2(2), 1-11.
- Pangestika, Widya, A., & Darmawan, J. (2018). "Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) (Studi Pada Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Panjang).
- Peraturan Daerah. (2024). *Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 02 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri. (2020). *Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Peraturan Republik Indonesia. (2000). *Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang PDRD*.
- Peraturan Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah*.

- Peraturan Republik Indonesia.(2004).*Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah.*
- Peraturan Republik Indonesia.(2004).*Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.*
- Peraturan Pemerintah. (2008).*Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.*
- Peraturan Republik Indonesia.(2009).*Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.*
- Peraturan Republik Indonesia.(2022).*Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.*
- Peraturan Walikota.(2016). *Peraturan Walikota Jambi Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame.*
- Purba, R. B. (2023). *Teori Akuntansi: Sebuah Pemahaman untuk Mendukung Penelitian di Bidang Akuntansi.* Merdeka Kreasi.
- Rolando, J., Eka Widiastuti, N. P., & Ajengtiyas Saputri Mashuri, A. (2021). Efektivitas Pengendalian Internal Pemungutan Pajak Reklame Pada Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kelapa Gading. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 2(7), 1133–1154. <https://doi.org/10.36418/jiss.v2i7.364>
- Romney, & Steinbart. (2006). *Accounting Information System.* Salemba Empat.
- Siahaan, M. (2009). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Edisi Revi).* PT. Raja Grafindo Persada.
- Sidharta, Iwan, & Wati, M. (2015). Perancangan Dan Implementasi Sistem Informasi Urunan Desa (URDES) Berdasarkan Pada Pajak Bumi Dan Bangunan. *Jurnal Computer & Bisnis.*
- Surachman, R., & Arwan Gunawan. (2023). *Evaluasi Penerapan Sistem Pengendalian Intern Atas Prosedur Penerimaan Pajak Reklame Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.* 4(1), 32–38.
- Tiswiyanti, W., Hernando, R., & Prasetyo, E. (2023). Tax Socialization and Assistance in Kademangan, Muaro District, Jambi Sosialisasi dan Pendampingan Perpajakan di Kademangan Kabupaten Muaro Jambi. *Journal of Society*, 2(6), 423–428. <https://journal.formosapublisher.org/index.php/ijds/article/view/7556%0A>
- Tolley, S. S. dkk. (2017). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Perangkat Daerah Kabupaten Sigi. *E Jurnal Katalogis*, 5(3), Hal.179-190. <https://media.neliti.com/media/publications/143882-ID-pengaruh-sistem-pengendalian-intern-peme.pdf>

Tuanakotta, T. M. (2014). *Audit Berbasis ISA*. Salemba Empat.

Yusuf, S., Aswati, W. O., & Yulianti. (2020). *Evaluasi Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kolaka*. V.